



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan atau pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (17) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan dana alokasi umum, dan/atau kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
2. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nomor 1073/B.B1/GT.01.22/2025 tanggal 28 November 2025 hal Usulan Perubahan Alokasi Tunjangan Guru ASND Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 berupa tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, yang terdiri atas subjenis:
a. dana tunjangan profesi guru aparatur sipil negara daerah;
b. dana tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah; dan
c. dana tunjangan khusus guru aparatur sipil negara daerah.

KEDUA : Perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pelaksanaan revisi anggaran dana alokasi khusus nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai rincian dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan

Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka penyaluran dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang telah dilakukan sebelum Keputusan Menteri ini berlaku, diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Provinsi Aceh	558.970.637.000	2.009.000.000	5.666.875.000
2	Kab. Aceh Barat	64.743.356.000	668.750.000	6.584.224.000
3	Kab. Aceh Besar	93.751.733.000	274.750.000	3.184.101.000
4	Kab. Aceh Selatan	81.825.346.000	285.000.000	7.102.417.000
5	Kab. Aceh Singkil	50.562.910.000	360.000.000	6.353.760.000
6	Kab. Aceh Tengah	85.112.097.000	356.250.000	3.776.570.000
7	Kab. Aceh Tenggara	68.246.026.000	378.000.000	950.657.000
8	Kab. Aceh Timur	138.266.054.000	393.000.000	5.380.420.000
9	Kab. Aceh Utara	183.820.091.000	1.123.500.000	27.221.915.000
10	Kab. Bireuen	122.812.841.000	1.141.500.000	13.519.386.000
11	Kab. Pidie	114.704.107.000	523.500.000	1.253.095.000
12	Kab. Simeulue	45.037.823.000	0	1.114.882.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kota Banda Aceh	62.541.829.000	231.000.000	0
14	Kota Sabang	18.163.892.000	108.000.000	0
15	Kota Langsa	43.930.338.000	231.000.000	0
16	Kota Lhokseumawe	49.629.851.000	196.500.000	0
17	Kab. Gayo Lues	34.472.727.000	350.500.000	1.952.558.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	51.521.678.000	156.000.000	0
19	Kab. Aceh Jaya	45.503.477.000	661.500.000	1.873.613.000
20	Kab. Nagan Raya	59.178.862.000	540.500.000	1.306.955.000
21	Kab. Aceh Tamiang	86.509.951.000	321.000.000	0
22	Kab. Bener Meriah	65.563.856.000	399.000.000	2.402.559.000
23	Kab. Pidie Jaya	48.782.009.000	82.500.000	1.642.322.000
24	Kota Subulussalam	33.299.408.000	365.250.000	1.897.434.000
25	Provinsi Sumatera Utara	671.917.780.000	1.092.000.000	37.236.828.000
26	Kab. Asahan	112.914.250.000	0	0
27	Kab. Dairi	96.112.819.000	1.780.500.000	409.463.000
28	Kab. Deli Serdang	256.254.239.000	250.000	0
29	Kab. Karo	90.279.482.000	2.300.000.000	0
30	Kab. Labuhanbatu	90.210.320.000	363.000.000	0
31	Kab. Langkat	206.892.229.000	848.500.000	721.339.000
32	Kab. Mandailing Natal	176.682.459.000	843.750.000	27.304.541.000
33	Kab. Nias	49.562.411.000	337.500.000	13.875.133.000
34	Kab. Simalungun	191.484.114.000	3.127.250.000	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	91.983.870.000	745.500.000	5.991.928.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	Kab. Tapanuli Tengah	75.689.174.000	522.000.000	8.666.257.000
37	Kab. Tapanuli Utara	102.415.035.000	831.000.000	5.231.479.000
38	Kab. Toba	77.764.729.000	2.293.250.000	4.390.756.000
39	Kota Binjai	69.431.893.000	206.250.000	0
40	Kota Medan	218.545.860.000	1.318.500.000	0
41	Kota Pematang Siantar	53.135.204.000	472.500.000	0
42	Kota Sibolga	25.309.398.000	52.500.000	0
43	Kota Tanjung Balai	33.222.698.000	72.000.000	0
44	Kota Tebing Tinggi	38.571.546.000	399.000.000	0
45	Kota Padangsidimpuan	52.012.324.000	190.500.000	0
46	Kab. Pakpak Bharat	25.460.131.000	186.000.000	296.620.000
47	Kab. Nias Selatan	51.049.507.000	1.288.500.000	54.870.782.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	74.582.463.000	33.750.000	1.280.982.000
49	Kab. Serdang Bedagai	137.745.849.000	0	0
50	Kab. Samosir	55.822.050.000	0	945.945.000
51	Kab. Batu Bara	87.155.260.000	1.272.750.000	0
52	Kab. Padang Lawas	75.805.120.000	695.750.000	10.157.698.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	61.923.101.000	360.000.000	7.480.904.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	66.873.916.000	508.250.000	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	83.762.605.000	442.500.000	2.622.017.000
56	Kab. Nias Utara	56.426.714.000	349.250.000	36.521.725.000
57	Kab. Nias Barat	47.013.720.000	742.000.000	65.339.957.000
58	Kota Gunungsitoli	47.775.901.000	646.500.000	3.467.139.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	Provinsi Sumatera Barat	536.552.853.000	998.250.000	3.641.411.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	143.696.296.000	1.346.250.000	0
61	Kab. Agam	172.787.851.000	566.500.000	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	31.950.692.000	851.250.000	32.469.653.000
63	Kab. Padang Pariaman	151.620.440.000	643.500.000	0
64	Kab. Pasaman	110.877.370.000	626.750.000	0
65	Kab. Pesisir Selatan	183.443.310.000	1.047.750.000	1.649.977.000
66	Kab. Sijunjung	94.093.511.000	357.000.000	0
67	Kab. Solok	133.830.502.000	398.500.000	6.360.946.000
68	Kab. Tanah Datar	117.274.013.000	1.191.000.000	0
69	Kota Bukittinggi	33.231.511.000	180.250.000	0
70	Kota Padang Panjang	19.108.360.000	0	0
71	Kota Padang	206.293.561.000	2.197.000.000	0
72	Kota Payakumbuh	42.760.936.000	112.500.000	0
73	Kota Sawahlunto	26.574.423.000	102.000.000	0
74	Kota Solok	26.638.338.000	216.000.000	0
75	Kota Pariaman	34.336.888.000	145.500.000	0
76	Kab. Pasaman Barat	133.417.335.000	0	0
77	Kab. Dharmasraya	80.151.986.000	514.750.000	3.390.240.000
78	Kab. Solok Selatan	64.950.660.000	211.500.000	5.269.464.000
79	Provinsi Riau	496.350.549.000	2.682.500.000	7.580.445.000
80	Kab. Bengkalis	170.875.581.000	1.175.250.000	0
81	Kab. Indragiri Hilir	143.254.073.000	1.727.750.000	50.126.102.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
82	Kab. Indragiri Hulu	128.619.168.000	2.163.750.000	0
83	Kab. Kampar	223.624.446.000	4.912.750.000	10.715.268.000
84	Kab. Kuantan Singingi	107.789.681.000	594.000.000	2.665.877.000
85	Kab. Pelalawan	110.195.734.000	1.277.250.000	11.681.899.000
86	Kab. Rokan Hilir	157.653.017.000	1.069.750.000	4.124.794.000
87	Kab. Rokan Hulu	152.743.715.000	0	8.527.616.000
88	Kab. Siak	145.588.909.000	230.250.000	712.590.000
89	Kota Dumai	80.776.165.000	921.750.000	0
90	Kota Pekanbaru	144.071.540.000	1.005.750.000	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	58.963.260.000	385.250.000	25.529.442.000
92	Provinsi Jambi	248.443.782.000	662.750.000	253.506.000
93	Kab. Batanghari	88.931.398.000	1.803.250.000	0
94	Kab. Bungo	64.043.107.000	1.000.000.000	0
95	Kab. Kerinci	78.702.014.000	751.500.000	134.670.000
96	Kab. Merangin	87.492.028.000	1.094.000.000	3.896.830.000
97	Kab. Muaro Jambi	99.689.974.000	1.022.000.000	0
98	Kab. Sarolangun	63.509.281.000	816.000.000	3.657.178.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	83.140.550.000	1.625.250.000	5.640.151.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	61.607.161.000	580.000.000	2.064.024.000
101	Kab. Tebo	65.168.465.000	886.500.000	0
102	Kota Jambi	100.423.412.000	0	0
103	Kota Sungai Penuh	36.426.903.000	355.500.000	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	538.341.610.000	2.976.500.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105	Kab. Lahat	113.091.582.000	0	0
106	Kab. Musi Banyuasin	185.863.238.000	1.704.750.000	12.847.940.000
107	Kab. Musi Rawas	92.842.341.000	563.750.000	1.769.313.000
108	Kab. Muara Enim	155.768.261.000	2.228.500.000	0
109	Kab. Ogan Komering Ilir	201.034.413.000	1.648.000.000	11.100.384.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	99.544.920.000	1.698.000.000	0
111	Kota Palembang	261.404.738.000	4.501.000.000	0
112	Kota Prabumulih	52.484.289.000	553.250.000	0
113	Kota Pagar Alam	35.099.281.000	82.250.000	0
114	Kota Lubuk Linggau	53.774.374.000	261.000.000	0
115	Kab. Banyuasin	225.886.987.000	3.247.250.000	4.265.562.000
116	Kab. Ogan Ilir	109.309.644.000	1.455.250.000	0
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	147.414.888.000	2.690.500.000	0
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	84.309.682.000	0	7.019.766.000
119	Kab. Empat Lawang	62.678.336.000	344.500.000	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	56.328.405.000	421.500.000	1.057.026.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	40.920.821.000	235.500.000	481.262.000
122	Provinsi Bengkulu	195.993.165.000	315.500.000	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	69.654.989.000	384.000.000	0
124	Kab. Bengkulu Utara	97.594.912.000	237.000.000	0
125	Kab. Rejang Lebong	67.814.921.000	0	0
126	Kota Bengkulu	83.252.168.000	1.217.250.000	0
127	Kab. Kaur	57.892.153.000	568.500.000	1.793.631.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
128	Kab. Seluma	69.034.044.000	767.500.000	980.300.000
129	Kab. Mukomuko	58.331.644.000	289.500.000	0
130	Kab. Lebong	34.918.031.000	300.000.000	178.479.000
131	Kab. Kepahiang	47.872.671.000	691.500.000	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	44.710.967.000	77.500.000	128.372.000
133	Provinsi Lampung	452.592.949.000	0	514.861.000
134	Kab. Lampung Barat	83.886.754.000	1.962.000.000	339.024.000
135	Kab. Lampung Selatan	144.357.952.000	277.500.000	0
136	Kab. Lampung Tengah	265.576.713.000	250.000	0
137	Kab. Lampung Utara	129.278.938.000	1.268.750.000	0
138	Kab. Lampung Timur	172.128.495.000	525.250.000	0
139	Kab. Tanggamus	145.918.082.000	2.156.500.000	5.214.492.000
140	Kab. Tulang Bawang	80.959.195.000	874.250.000	3.763.283.000
141	Kab. Way Kanan	109.605.250.000	1.002.750.000	3.889.947.000
142	Kota Bandar Lampung	153.323.436.000	407.500.000	0
143	Kota Metro	45.969.889.000	291.000.000	0
144	Kab. Pesawaran	93.271.878.000	214.500.000	899.474.000
145	Kab. Pringsewu	102.744.734.000	1.452.500.000	0
146	Kab. Mesuji	63.632.791.000	78.750.000	3.296.326.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	63.823.846.000	218.500.000	0
148	Kab. Pesisir Barat	54.704.601.000	418.500.000	3.738.873.000
149	Provinsi DKI Jakarta	1.349.741.375.000	7.019.250.000	0
150	Provinsi Jawa Barat	1.534.723.417.000	12.873.500.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
151	Kab. Bandung	410.648.861.000	6.425.000.000	0
152	Kab. Bekasi	389.114.677.000	3.239.500.000	0
153	Kab. Bogor	531.732.417.000	0	0
154	Kab. Ciamis	241.272.855.000	4.636.000.000	0
155	Kab. Cianjur	376.991.236.000	1.234.250.000	520.765.000
156	Kab. Cirebon	376.615.187.000	1.697.500.000	0
157	Kab. Garut	428.205.329.000	3.113.250.000	0
158	Kab. Indramayu	238.756.708.000	463.500.000	0
159	Kab. Karawang	291.200.304.000	2.702.500.000	0
160	Kab. Kuningan	282.926.151.000	489.250.000	0
161	Kab. Majalengka	277.348.927.000	1.306.250.000	0
162	Kab. Purwakarta	167.336.618.000	557.000.000	0
163	Kab. Subang	265.741.175.000	928.500.000	0
164	Kab. Sukabumi	283.388.528.000	1.735.500.000	0
165	Kab. Sumedang	247.187.200.000	610.500.000	0
166	Kab. Tasikmalaya	311.449.182.000	3.385.500.000	0
167	Kota Bandung	299.304.978.000	3.784.750.000	0
168	Kota Bekasi	237.353.866.000	227.000.000	0
169	Kota Bogor	142.548.486.000	973.500.000	0
170	Kota Cirebon	79.092.579.000	641.250.000	0
171	Kota Depok	128.118.206.000	448.250.000	0
172	Kota Sukabumi	56.309.676.000	228.000.000	0
173	Kota Tasikmalaya	115.822.609.000	1.043.250.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
174	Kota Cimahi	83.694.736.000	436.000.000	0
175	Kota Banjar	46.040.733.000	0	0
176	Kab. Bandung Barat	219.917.168.000	0	0
177	Kab. Pangandaran	94.698.672.000	789.500.000	0
178	Provinsi Jawa Tengah	1.463.003.426.000	1.205.500.000	0
179	Kab. Banjarnegara	204.852.559.000	622.000.000	0
180	Kab. Banyumas	313.666.251.000	695.750.000	0
181	Kab. Batang	182.236.831.000	957.500.000	0
182	Kab. Blora	219.988.489.000	1.351.500.000	0
183	Kab. Boyolali	186.064.310.000	516.500.000	0
184	Kab. Brebes	334.171.429.000	2.214.000.000	0
185	Kab. Cilacap	332.335.530.000	1.746.250.000	0
186	Kab. Demak	199.881.325.000	445.000.000	0
187	Kab. Grobogan	265.066.967.000	1.092.500.000	0
188	Kab. Jepara	210.724.718.000	1.050.750.000	635.640.000
189	Kab. Karanganyar	204.318.255.000	495.000.000	0
190	Kab. Kebumen	283.392.806.000	512.000.000	0
191	Kab. Kendal	221.344.709.000	500.000	0
192	Kab. Klaten	236.601.005.000	1.045.500.000	0
193	Kab. Kudus	126.660.664.000	0	0
194	Kab. Magelang	195.555.990.000	2.494.500.000	261.243.000
195	Kab. Pati	237.023.436.000	1.170.000.000	0
196	Kab. Pekalongan	179.006.931.000	624.000.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
197	Kab. Pemalang	288.299.673.000	0	0
198	Kab. Purbalingga	202.439.133.000	1.081.500.000	0
199	Kab. Purworejo	189.218.272.000	831.750.000	0
200	Kab. Rembang	144.410.334.000	2.158.500.000	0
201	Kab. Semarang	191.595.519.000	990.750.000	0
202	Kab. Sragen	201.596.670.000	891.000.000	0
203	Kab. Sukoharjo	161.539.058.000	427.500.000	0
204	Kab. Tegal	252.561.845.000	717.000.000	3.786.358.000
205	Kab. Temanggung	167.453.032.000	929.750.000	0
206	Kab. Wonogiri	257.745.780.000	796.500.000	0
207	Kab. Wonosobo	175.970.176.000	878.000.000	603.604.000
208	Kota Magelang	40.090.661.000	180.250.000	0
209	Kota Pekalongan	50.581.844.000	112.500.000	0
210	Kota Salatiga	45.477.865.000	530.250.000	0
211	Kota Semarang	209.809.153.000	1.458.000.000	0
212	Kota Surakarta	103.846.004.000	1.209.250.000	0
213	Kota Tegal	60.758.297.000	988.500.000	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	250.483.774.000	255.500.000	0
215	Kab. Bantul	178.930.385.000	506.500.000	0
216	Kab. Gunung Kidul	204.916.280.000	461.750.000	0
217	Kab. Kulon Progo	117.334.272.000	1.012.250.000	0
218	Kab. Sleman	182.839.745.000	1.885.250.000	0
219	Kota Yogyakarta	69.034.006.000	0	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220	Provinsi Jawa Timur	1.548.924.442.000	3.704.250.000	0
221	Kab. Bangkalan	182.791.606.000	1.602.000.000	0
222	Kab. Banyuwangi	254.417.306.000	416.000.000	0
223	Kab. Blitar	256.683.774.000	1.607.000.000	0
224	Kab. Bojonegoro	267.739.881.000	1.404.000.000	0
225	Kab. Bondowoso	159.282.801.000	177.500.000	251.868.000
226	Kab. Gresik	171.380.204.000	1.185.750.000	0
227	Kab. Jember	296.681.718.000	708.000.000	0
228	Kab. Jombang	187.582.637.000	569.250.000	0
229	Kab. Kediri	213.832.353.000	1.691.500.000	0
230	Kab. Lamongan	235.002.275.000	1.725.250.000	0
231	Kab. Lumajang	158.227.165.000	114.000.000	28.792.000
232	Kab. Madiun	142.448.799.000	1.521.000.000	0
233	Kab. Magetan	171.234.707.000	729.000.000	0
234	Kab. Malang	335.916.505.000	4.450.250.000	0
235	Kab. Mojokerto	179.280.423.000	2.349.500.000	0
236	Kab. Nganjuk	252.577.940.000	3.048.250.000	0
237	Kab. Ngawi	164.350.439.000	2.368.250.000	0
238	Kab. Pacitan	158.887.476.000	1.733.000.000	0
239	Kab. Pamekasan	163.388.836.000	0	0
240	Kab. Pasuruan	281.701.216.000	1.812.000.000	0
241	Kab. Ponorogo	198.988.880.000	1.735.500.000	0
242	Kab. Probolinggo	197.328.986.000	741.000.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
243	Kab. Sampang	167.799.976.000	0	0
244	Kab. Sidoarjo	252.570.758.000	2.616.500.000	0
245	Kab. Situbondo	145.341.014.000	162.000.000	0
246	Kab. Sumenep	176.657.006.000	670.000.000	5.775.444.000
247	Kab. Trenggalek	144.855.785.000	2.373.500.000	0
248	Kab. Tuban	219.106.114.000	599.250.000	0
249	Kab. Tulungagung	222.381.468.000	527.500.000	0
250	Kota Blitar	34.772.512.000	325.000.000	0
251	Kota Kediri	52.846.063.000	392.500.000	0
252	Kota Madiun	45.920.283.000	143.000.000	0
253	Kota Malang	114.832.794.000	168.750.000	0
254	Kota Mojokerto	32.327.003.000	0	0
255	Kota Pasuruan	43.112.444.000	0	0
256	Kota Probolinggo	47.057.973.000	202.250.000	0
257	Kota Surabaya	298.580.762.000	2.133.750.000	0
258	Kota Batu	40.484.665.000	166.250.000	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	286.403.940.000	250.000	10.189.039.000
260	Kab. Bengkayang	74.407.419.000	1.079.500.000	17.300.143.000
261	Kab. Landak	66.473.351.000	0	22.260.667.000
262	Kab. Kapuas Hulu	74.704.116.000	1.546.250.000	14.149.778.000
263	Kab. Ketapang	134.720.357.000	4.314.000.000	34.428.788.000
264	Kab. Mempawah	64.983.501.000	673.000.000	1.802.708.000
265	Kab. Sambas	116.450.408.000	615.000.000	3.758.509.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
266	Kab. Sanggau	90.684.709.000	1.909.000.000	23.781.533.000
267	Kab. Sintang	108.002.535.000	0	61.007.386.000
268	Kota Pontianak	77.177.363.000	1.759.500.000	0
269	Kota Singkawang	41.673.080.000	1.107.500.000	0
270	Kab. Sekadau	46.855.557.000	2.312.750.000	10.869.978.000
271	Kab. Melawi	58.312.366.000	981.000.000	31.524.595.000
272	Kab. Kayong Utara	43.325.650.000	915.000.000	3.475.454.000
273	Kab. Kubu Raya	105.206.349.000	1.431.250.000	7.710.058.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	219.929.259.000	2.418.000.000	5.105.114.000
275	Kab. Barito Selatan	54.294.764.000	195.500.000	16.935.474.000
276	Kab. Barito Utara	67.843.872.000	780.250.000	8.735.575.000
277	Kab. Kapuas	125.184.531.000	712.250.000	37.442.395.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	71.339.119.000	1.059.750.000	943.563.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	104.561.683.000	1.311.250.000	12.293.673.000
280	Kota Palangkaraya	74.523.343.000	992.250.000	0
281	Kab. Katingan	62.879.081.000	1.129.250.000	13.816.749.000
282	Kab. Seruyan	43.073.863.000	723.750.000	5.539.148.000
283	Kab. Sukamara	26.228.743.000	196.500.000	1.658.529.000
284	Kab. Lamandau	33.311.314.000	214.500.000	4.272.133.000
285	Kab. Gunung Mas	64.903.342.000	864.500.000	16.394.697.000
286	Kab. Pulang Pisau	56.425.143.000	1.032.000.000	3.902.914.000
287	Kab. Murung Raya	56.625.972.000	1.298.250.000	20.396.307.000
288	Kab. Barito Timur	58.707.283.000	1.667.500.000	837.042.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	258.333.561.000	1.718.500.000	912.633.000
290	Kab. Banjar	148.114.192.000	730.500.000	3.621.130.000
291	Kab. Barito Kuala	115.628.445.000	1.415.000.000	1.843.937.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	72.546.370.000	324.500.000	1.514.027.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	80.913.398.000	648.750.000	1.828.131.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	69.590.691.000	274.250.000	2.525.345.000
295	Kab. Kotabaru	68.511.680.000	736.000.000	1.132.896.000
296	Kab. Tabalong	90.990.613.000	1.042.750.000	5.385.266.000
297	Kab. Tanah Laut	115.204.425.000	1.036.250.000	0
298	Kab. Tapin	61.073.043.000	358.500.000	721.143.000
299	Kota Banjarbaru	60.612.469.000	330.500.000	0
300	Kota Banjarmasin	116.095.095.000	524.250.000	0
301	Kab. Balangan	56.800.327.000	114.500.000	1.624.475.000
302	Kab. Tanah Bumbu	99.940.232.000	1.397.500.000	610.400.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	256.320.312.000	3.112.000.000	2.144.198.000
304	Kab. Berau	67.191.071.000	966.250.000	2.542.758.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	217.493.144.000	0	10.155.661.000
306	Kab. Kutai Barat	48.404.055.000	754.000.000	9.971.375.000
307	Kab. Kutai Timur	97.461.028.000	1.252.000.000	3.910.824.000
308	Kab. Paser	87.327.048.000	1.520.250.000	6.811.486.000
309	Kota Balikpapan	108.459.784.000	1.276.500.000	0
310	Kota Bontang	32.100.940.000	262.500.000	0
311	Kota Samarinda	134.119.272.000	253.750.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
312	Kab. Penajam Paser Utara	59.785.779.000	403.500.000	0
313	Kab. Mahakam Ulu	7.388.571.000	262.000.000	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	210.370.380.000	13.500.000	128.099.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	62.922.299.000	609.000.000	1.515.933.000
316	Kab. Minahasa	82.924.325.000	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	47.163.630.000	225.000.000	7.448.687.000
318	Kota Bitung	33.541.421.000	606.000.000	0
319	Kota Manado	68.116.824.000	1.066.500.000	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	37.279.871.000	389.500.000	1.218.873.000
321	Kab. Minahasa Selatan	60.132.799.000	88.500.000	260.214.000
322	Kota Tomohon	27.585.847.000	105.000.000	0
323	Kab. Minahasa Utara	52.763.074.000	187.500.000	808.301.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	18.164.912.000	244.500.000	82.233.000
325	Kota Kotamobagu	28.591.261.000	654.750.000	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	25.572.930.000	510.000.000	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	33.903.389.000	141.750.000	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	22.223.012.000	253.500.000	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	25.432.807.000	186.000.000	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	268.841.598.000	2.915.500.000	1.808.587.000
331	Kab. Banggai	107.989.553.000	845.500.000	1.266.049.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	52.261.772.000	1.760.500.000	2.069.682.000
333	Kab. Buol	49.682.054.000	1.307.500.000	0
334	Kab. Toli-Toli	62.115.669.000	1.221.500.000	3.547.667.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
335	Kab. Donggala	110.716.775.000	2.429.000.000	8.742.802.000
336	Kab. Morowali	53.873.829.000	1.511.750.000	12.254.464.000
337	Kab. Poso	64.967.134.000	1.233.500.000	2.493.704.000
338	Kota Palu	100.425.587.000	714.750.000	0
339	Kab. Parigi Moutong	123.834.440.000	323.500.000	2.171.856.000
340	Kab. Tojo Una-Una	49.459.715.000	2.070.000.000	19.712.527.000
341	Kab. Sigi	78.957.978.000	36.000.000	11.865.325.000
342	Kab. Banggai Laut	29.490.674.000	402.000.000	9.179.459.000
343	Kab. Morowali Utara	49.827.221.000	1.034.250.000	5.914.181.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	760.704.264.000	3.573.000.000	5.232.932.000
345	Kab. Bantaeng	81.786.969.000	780.000.000	0
346	Kab. Barru	77.058.533.000	1.386.250.000	0
347	Kab. Bone	248.275.455.000	2.001.250.000	923.118.000
348	Kab. Bulukumba	130.636.703.000	21.250.000	0
349	Kab. Enrekang	110.177.623.000	459.000.000	3.345.586.000
350	Kab. Gowa	161.276.339.000	1.070.500.000	0
351	Kab. Jeneponto	97.798.048.000	536.250.000	0
352	Kab. Luwu	109.678.166.000	297.000.000	16.991.364.000
353	Kab. Luwu Utara	112.635.337.000	1.270.250.000	13.236.545.000
354	Kab. Maros	114.374.587.000	427.500.000	223.861.000
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	126.314.231.000	896.750.000	13.131.704.000
356	Kota Palopo	49.218.123.000	99.000.000	0
357	Kab. Luwu Timur	80.376.881.000	427.500.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
358	Kab. Pinrang	116.798.726.000	1.027.000.000	4.326.238.000
359	Kab. Sinjai	99.712.551.000	945.500.000	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	70.704.277.000	141.000.000	11.047.820.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	95.856.201.000	444.000.000	0
362	Kab. Soppeng	103.506.453.000	0	0
363	Kab. Takalar	80.502.115.000	387.500.000	0
364	Kab. Tana Toraja	84.532.043.000	838.500.000	7.335.223.000
365	Kab. Wajo	114.570.485.000	287.000.000	0
366	Kota Parepare	54.201.353.000	83.000.000	0
367	Kota Makassar	276.067.960.000	942.250.000	0
368	Kab. Toraja Utara	98.898.292.000	572.750.000	3.616.478.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	355.504.216.000	0	4.024.142.000
370	Kab. Buton	61.027.755.000	0	621.956.000
371	Kab. Konawe	113.361.418.000	1.957.750.000	4.076.660.000
372	Kab. Kolaka	79.935.448.000	909.000.000	2.906.669.000
373	Kab. Muna	118.017.788.000	840.000.000	7.830.719.000
374	Kota Kendari	109.058.324.000	580.750.000	0
375	Kota Baubau	54.505.759.000	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	110.779.346.000	0	3.851.948.000
377	Kab. Bombana	65.245.294.000	476.250.000	6.071.877.000
378	Kab. Wakatobi	51.583.815.000	574.500.000	0
379	Kab. Kolaka Utara	46.690.690.000	228.750.000	2.658.955.000
380	Kab. Konawe Utara	35.944.162.000	364.500.000	1.681.352.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
381	Kab. Buton Utara	37.910.633.000	0	5.263.297.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	17.438.586.000	524.500.000	0
383	Kab. Kolaka Timur	60.071.484.000	378.750.000	4.292.291.000
384	Kab. Muna Barat	43.327.944.000	276.500.000	4.918.394.000
385	Kab. Buton Tengah	47.857.320.000	346.500.000	2.944.426.000
386	Kab. Buton Selatan	42.080.847.000	204.000.000	2.071.494.000
387	Provinsi Bali	291.576.495.000	1.161.000.000	0
388	Kab. Badung	132.182.893.000	0	0
389	Kab. Bangli	61.947.791.000	364.500.000	0
390	Kab. Buleleng	198.900.938.000	2.697.000.000	0
391	Kab. Gianyar	99.542.452.000	147.000.000	0
392	Kab. Jembrana	70.903.531.000	1.837.000.000	0
393	Kab. Karangasem	146.612.688.000	731.250.000	0
394	Kab. Klungkung	73.244.296.000	282.750.000	0
395	Kab. Tabanan	123.761.321.000	2.077.250.000	0
396	Kota Denpasar	107.053.113.000	1.149.500.000	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	405.465.693.000	2.826.500.000	2.046.596.000
398	Kab. Bima	169.111.800.000	631.500.000	7.332.954.000
399	Kab. Dompu	85.824.911.000	34.250.000	0
400	Kab. Lombok Barat	149.783.317.000	913.750.000	0
401	Kab. Lombok Tengah	222.898.861.000	2.802.250.000	0
402	Kab. Lombok Timur	277.152.611.000	1.497.750.000	0
403	Kab. Sumbawa	161.858.218.000	3.548.250.000	8.517.705.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
404	Kota Mataram	91.973.315.000	2.444.500.000	0
405	Kota Bima	57.036.000.000	153.000.000	0
406	Kab. Sumbawa Barat	61.105.861.000	1.278.000.000	0
407	Kab. Lombok Utara	58.927.049.000	377.000.000	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	418.922.157.000	709.750.000	18.095.710.000
409	Kab. Alor	58.702.132.000	806.750.000	17.827.898.000
410	Kab. Belu	57.130.625.000	259.500.000	2.117.591.000
411	Kab. Ende	73.817.405.000	2.034.000.000	6.758.691.000
412	Kab. Flores Timur	82.278.820.000	862.250.000	2.940.055.000
413	Kab. Kupang	94.643.852.000	1.014.500.000	13.797.788.000
414	Kab. Lembata	48.790.773.000	340.500.000	5.382.525.000
415	Kab. Manggarai	105.162.517.000	863.500.000	7.245.561.000
416	Kab. Ngada	66.756.238.000	1.223.250.000	3.053.856.000
417	Kab. Sikka	87.060.545.000	550.500.000	20.995.141.000
418	Kab. Sumba Barat	33.902.082.000	418.000.000	1.310.024.000
419	Kab. Sumba Timur	82.199.430.000	1.621.250.000	6.312.746.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	106.519.520.000	0	10.087.851.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	82.222.976.000	1.108.750.000	3.362.240.000
422	Kota Kupang	93.388.329.000	1.142.250.000	0
423	Kab. Rote Ndao	59.205.888.000	982.500.000	16.933.901.000
424	Kab. Manggarai Barat	76.231.805.000	165.000.000	13.540.764.000
425	Kab. Nagekeo	59.993.786.000	349.250.000	936.778.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	61.761.026.000	1.653.000.000	17.896.538.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
427	Kab. Sumba Tengah	29.414.922.000	323.750.000	8.285.461.000
428	Kab. Manggarai Timur	83.317.776.000	685.000.000	18.529.441.000
429	Kab. Sabu Raijua	35.184.315.000	148.250.000	5.084.492.000
430	Kab. Malaka	38.681.355.000	200.500.000	12.716.987.000
431	Provinsi Maluku	188.721.741.000	3.265.000.000	13.511.067.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	16.820.058.000	897.250.000	4.645.924.000
433	Kab. Maluku Tengah	105.814.851.000	1.380.000.000	4.970.356.000
434	Kab. Maluku Tenggara	21.920.836.000	0	9.813.318.000
435	Kab. Buru	51.253.355.000	403.500.000	12.841.518.000
436	Kota Ambon	81.403.732.000	1.325.250.000	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	52.490.857.000	2.079.000.000	11.635.440.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	17.494.520.000	899.750.000	40.299.527.000
439	Kab. Kepulauan Aru	26.220.390.000	557.000.000	29.274.119.000
440	Kota Tual	14.616.679.000	71.000.000	3.976.967.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	19.494.991.000	894.750.000	12.426.209.000
442	Kab. Buru Selatan	16.092.166.000	1.389.000.000	27.475.905.000
443	Provinsi Papua	3.441.003.000	0	0
444	Kab. Biak Numfor	42.572.720.000	0	11.970.336.000
445	Kab. Jayapura	54.758.189.000	290.250.000	2.634.327.000
446	Kab. Kepulauan Yapen	24.951.864.000	0	3.528.175.000
447	Kota Jayapura	79.845.737.000	0	0
448	Kab. Sarmi	15.165.425.000	549.750.000	979.593.000
449	Kab. Keerom	28.746.983.000	730.250.000	13.395.678.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
450	Kab. Waropen	8.247.556.000	0	4.663.572.000
451	Kab. Supiori	13.724.521.000	0	5.192.455.000
452	Kab. Mamberamo Raya	2.719.238.000	0	3.811.179.000
453	Provinsi Maluku Utara	102.540.598.000	838.500.000	12.954.902.000
454	Kab. Halmahera Tengah	15.082.019.000	727.500.000	5.469.824.000
455	Kota Ternate	52.593.471.000	352.500.000	0
456	Kab. Halmahera Barat	45.514.093.000	712.500.000	18.089.660.000
457	Kab. Halmahera Timur	21.158.914.000	612.000.000	6.618.302.000
458	Kab. Halmahera Selatan	34.305.290.000	2.638.000.000	17.917.820.000
459	Kab. Halmahera Utara	27.424.510.000	0	9.287.243.000
460	Kab. Kepulauan Sula	22.431.701.000	877.500.000	8.485.978.000
461	Kota Tidore Kepulauan	40.355.813.000	473.250.000	184.560.000
462	Kab. Pulau Morotai	10.897.521.000	343.500.000	2.570.096.000
463	Kab. Pulau Taliabu	12.352.277.000	605.250.000	15.349.002.000
464	Provinsi Banten	341.628.593.000	1.082.000.000	774.404.000
465	Kab. Lebak	277.640.015.000	3.995.000.000	11.941.961.000
466	Kab. Pandeglang	300.157.485.000	1.652.250.000	0
467	Kab. Serang	241.386.723.000	3.970.500.000	0
468	Kab. Tangerang	342.077.011.000	0	0
469	Kota Cilegon	91.479.804.000	920.750.000	0
470	Kota Tangerang	228.444.159.000	4.017.250.000	0
471	Kota Serang	121.411.360.000	458.250.000	0
472	Kota Tangerang Selatan	149.755.533.000	550.000.000	0

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
473	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102.425.468.000	1.365.750.000	0
474	Kab. Bangka	69.484.970.000	848.000.000	0
475	Kab. Belitung	45.319.458.000	457.250.000	0
476	Kota Pangkal Pinang	40.394.190.000	621.500.000	0
477	Kab. Bangka Selatan	61.380.116.000	823.250.000	0
478	Kab. Bangka Tengah	52.809.391.000	631.500.000	0
479	Kab. Bangka Barat	57.207.529.000	957.500.000	0
480	Kab. Belitung Timur	44.861.959.000	270.000.000	0
481	Provinsi Gorontalo	124.444.667.000	1.066.500.000	390.326.000
482	Kab. Boalemo	59.406.022.000	863.750.000	3.856.399.000
483	Kab. Gorontalo	102.453.795.000	307.500.000	637.991.000
484	Kota Gorontalo	56.190.637.000	508.500.000	0
485	Kab. Pohuwato	54.149.627.000	918.500.000	0
486	Kab. Bone Bolango	60.069.676.000	877.750.000	0
487	Kab. Gorontalo Utara	54.214.470.000	260.250.000	2.349.779.000
488	Provinsi Kepulauan Riau	135.965.943.000	1.852.750.000	1.367.630.000
489	Kab. Natuna	36.804.593.000	458.000.000	1.611.997.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	23.341.000.000	327.000.000	5.640.407.000
491	Kab. Karimun	74.482.156.000	805.750.000	6.359.362.000
492	Kota Batam	157.873.192.000	384.000.000	0
493	Kota Tanjung Pinang	44.801.949.000	33.750.000	0
494	Kab. Lingga	50.230.962.000	300.500.000	10.064.974.000
495	Kab. Bintan	50.278.880.000	621.750.000	2.524.149.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
496	Provinsi Papua Barat	476.967.000	0	0
497	Kab. Fakfak	38.755.821.000	0	10.889.033.000
498	Kab. Manokwari	55.035.730.000	0	5.721.765.000
499	Kab. Teluk Bintuni	23.565.826.000	531.000.000	5.588.850.000
500	Kab. Teluk Wondama	14.036.633.000	276.000.000	4.877.327.000
501	Kab. Kaimana	22.029.937.000	0	12.903.255.000
502	Kab. Manokwari Selatan	9.338.923.000	0	2.791.346.000
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	13.582.093.000
504	Provinsi Sulawesi Barat	124.309.871.000	721.500.000	3.108.604.000
505	Kab. Majene	80.343.297.000	814.500.000	9.915.662.000
506	Kab. Mamuju	82.771.606.000	1.062.000.000	11.049.891.000
507	Kab. Polewali Mandar	128.024.378.000	1.320.000.000	5.021.942.000
508	Kab. Mamasa	50.732.313.000	3.000.000	21.638.911.000
509	Kab. Pasangkayu	39.937.016.000	361.500.000	667.958.000
510	Kab. Mamuju Tengah	43.724.217.000	358.000.000	1.860.779.000
511	Provinsi Kalimantan Utara	62.254.432.000	545.250.000	1.663.767.000
512	Kab. Bulungan	49.190.610.000	551.250.000	826.391.000
513	Kab. Malinau	28.150.201.000	9.250.000	11.546.383.000
514	Kab. Nunukan	48.583.568.000	493.000.000	9.100.574.000
515	Kota Tarakan	49.045.763.000	757.500.000	0
516	Kab. Tana Tidung	8.290.201.000	675.000.000	1.500.259.000
517	Provinsi Papua Selatan	571.858.000	0	0
518	Kab. Merauke	79.415.114.000	1.500.000	11.985.070.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
519	Kab. Boven Digoel	14.617.353.000	239.000.000	5.146.450.000
520	Kab. Mappi	25.976.013.000	1.025.500.000	22.126.211.000
521	Kab. Asmat	13.454.506.000	0	21.765.524.000
522	Provinsi Papua Tengah	211.927.000	0	0
523	Kab. Mimika	48.766.597.000	0	7.975.443.000
524	Kab. Nabire	50.393.853.000	788.500.000	2.099.791.000
525	Kab. Paniai	5.710.479.000	303.000.000	4.994.044.000
526	Kab. Puncak Jaya	3.887.283.000	0	0
527	Kab. Dogiyai	2.672.521.000	181.500.000	5.148.886.000
528	Kab. Puncak	1.386.917.000	52.500.000	4.067.568.000
529	Kab. Intan Jaya	2.629.997.000	0	3.677.202.000
530	Kab. Deiyai	2.357.590.000	0	174.028.000
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	19.265.880.000	351.250.000	6.813.142.000
533	Kab. Yahukimo	3.649.565.000	115.500.000	4.987.832.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	6.028.395.000	171.000.000	9.926.261.000
535	Kab. Tolikara	2.856.948.000	336.000.000	2.563.866.000
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	96.000.000	2.306.631.000
537	Kab. Yalimo	2.981.931.000	173.000.000	12.187.450.000
538	Kab. Lanny Jaya	6.298.189.000	0	11.019.152.000
539	Kab. Nduga	2.548.315.000	274.500.000	2.497.225.000
540	Provinsi Papua Barat Daya	391.680.000	0	0
541	Kab. Sorong	53.198.427.000	1.532.750.000	28.657.312.000

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH		
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
542	Kota Sorong	56.293.574.000	1.142.250.000	533.066.000
543	Kab. Raja Ampat	25.428.873.000	1.302.000.000	14.598.951.000
544	Kab. Sorong Selatan	24.283.070.000	1.215.500.000	26.864.099.000
545	Kab. Maybrat	11.711.880.000	0	10.506.672.000
546	Kab. Tambrauw	11.289.074.000	477.250.000	15.061.525.000
	Nasional	67.300.287.432.000	481.344.500.000	2.282.670.590.000

Keterangan:

Perubahan atas rincian dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah bersumber dari pergeseran alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dan Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

